



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Wibawa
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Rahardjo
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Februari 2017

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Budi Rahardjo

Wahyu Wibawa



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BAGIAN HUKUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum | 1 Jumlah Peraturan Presiden di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2 Dokumen |
| | | 2 Jumlah Rancangan Peraturan Menteri di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 1 Dokumen |
| 2 | Tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang SPK | 3 Prosentase penetapan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diusulkan | 83 % |
| | | 4 Jumlah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala BSN | 500 Dokumen |
| | | 5 Jumlah kajian peraturan perundang – undangan yang diselesaikan | 3 Kajian |
| 3 | Terselenggaranya layanan pengembangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum | 6 Prosentase pemberian bantuan hukum | 65 % |
| | | 7 Jumlah penyuluhan hukum bidang SPK | 7 Kegiatan |
| | | 8 Presentase peraturan perundangan yang diunggah | 78 % |

| Output/Komponen | Anggaran (Rp.) |
|---|----------------|
| 1 Layanan Hukum | 500.000.000 |
| 2 Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 1.729.800.000 |

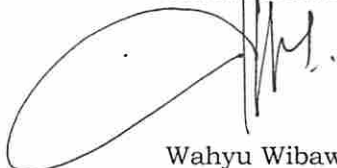
Pihak Kedua



Budi Rahardjo

Jakarta, 28 Februari 2017

Pihak Pertama



Wahyu Wibawa